



KH. Masdar F. Mas'udi:

## “NU Bukanlah Halte Penantian ‘Bis Politik’...”

*Apa yang seharusnya menjadi agenda prioritas PBNU di masa mendatang?*

Menurut saya, NU seharusnya senantiasa berpijak pada Khittah 1926. Dalam rumusan Khittah itu, setidaknya ada lima nilai yang perlu diperhatikan: 1) NU harus kembali pada organisasi sosial keagamaan. 2) Mengembalikan supremasi ulama atau Syuriah. 3) Mengambil jarak yang sehat dengan kekuatan politik mana pun. 4) Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat atau umat, dan 5) berpartisipasi dalam memajukan dan menjaga keutuhan bangsa.

*Apa makna kembali pada organisasi sosial keagamaan menurut Anda?*

Artinya, NU harus bergerak lebih maju ketimbang mendefinisikan diri kepada aspek-aspek ritual. Selama ini, ke-NU-an didefinisikan kepada bagaimana seseorang menjalankan ibadahnya. Itu

sah-sah saja sebagai modal dasar untuk menjadi daya ikat yang primer. Misalnya, orang NU adalah orang yang ketika shalat menggunakan *ushalli*, ketika salat subuh menggunakan qunut, membiasakan *shalawatan*, mentradisikan tahlil, dan semacamnya. Itu boleh-boleh saja sebagai ciri primer ke-NU-an. Tetapi sebagai organisasi sosial keagamaan, NU harus lebih maju lagi. Artinya, NU harus bisa mendefinisikan dirinya dalam konsep sosial yang jelas untuk membangun masyarakat. Masyarakat seperti apa yang hendak dibangun NU? Itu yang harus diperjelas. Karena NU adalah organisasi sosial, bukan organisasi peribadatan saja.

Untuk itu, kita seharusnya bertolak pada realitas sosial atau dari basis sosial itu sendiri. Basis sosial NU adalah masyarakat yang rata-rata ada di lapis bawah. Mereka adalah masyarakat yang secara ekonomi lemah, secara pendidikan tertinggal, begitu juga dalam hal sumber dayanya. Saya kira ini mengharuskan NU untuk memegang suatu prinsip ke-NU-an yang dituangkan dalam konsep sosialnya yang

sesuai dengan tantangan dan kebutuhan warganya. Dengan demikian, NU dalam pandangan sosialnya tidak harus betul-betul bertolak dari realitas sosial yang saya sebutkan tadi. Intinya bahwa NU harus memiliki konsep dan program yang jelas tentang bagaimana memberdayakan umat dalam berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

Di samping sebagai organisasi sosial, NU juga organisasi keagamaan. Arti dimensi keagamaan di sini adalah bahwa konsep sosial yang dicanangkan NU dalam kiprahnya harus berbasis pada etika dan nilai-nilai keagamaan. Bukan sekadar sebuah konsep yang —katakanlah— sekuler. Jadi, harus ada aturan transendentalnya. Secara formal juga harus memiliki aturan yang kuat dan kokoh dari nash-nash ajaran. Itulah sebenarnya yang membedakan antara konsep sosial yang diusung NU dengan konsep sosial yang diusung organisasi-organisasi non keagamaan pada umumnya. Ini tentu saja merupakan tantangan yang tidak ringan, karena kita semua mengakui bahwa konsep sosial yang *by design* dan secara sistematis dirumuskan dari pesan-pesan etika dan moral ajaran itu masih jauh dari memadai. Kita bisa saja membaca konsep-konsep sosial, ekonomi, dan sebagainya dari konsep-konsep yang ada yang dirumuskan berdasarkan pandangan sekularistik, akan tetapi kita tentu harus mampu memberikan landasan transendentalnya dengan ajaran agama kita. Saya pikir, pada saatnya kita akan menemukan titik beda yang esensial antara konsep-

konsep sosial yang dibangun atas dasar pemikiran sekuler dengan konsep sosial yang dibangun atas dasar etika dan nilai keagamaan.

Intinya bahwa sebagai organisasi sosial keagamaan, NU harus bergerak secara sistematis mengembangkan ajaran-ajaran keagamaan sebagai pesan etik dan moral secara komprehensif. Kalau selama ini, kita lebih memahami fiqh sebagai konsep etika peribadatan, dan ke-NU-an kita dipertemukan dengan konsep etika peribadatan yang dipahami sebagai ciri ke-NU-an, nah kita harus bergerak ke depan, kita harus mengembangkan fiqh sebagai etika sosialnya. Misalnya, fiqh sebagai konsep etika dalam keluarga yang sesuai dengan Aswaja itu seperti apa; harus mengembangkan etika mua'amat (bisnis) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Aswaja itu seperti apa; etika pergaulan antar umat yang harus dikembangkan yang sesuai dengan prinsip Aswaja itu bagaimana. Juga bagaimana bersikap, bergaul, dan memperlakukan orang yang berbeda agama, etnik, dan tradisi. Itu semua harus dikembangkan oleh NU dengan landasan prinsip-prinsip Aswaja.

Begitu juga harus mengembangkan fiqh atau etika berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Aswaja. Saya memahami fiqh sebagai etika. Bagaimana kalau kita menjadi seorang politisi. Bagaimana orang NU, penganut Aswaja itu, berperilaku di dalam dunia politik praktis. Akhlaknya harus bagaimana. Jangan sampai warga



NU yang berpolitik itu perilakunya, akhlakunya, ternyata sama saja dengan warga lain yang tercela. Begitu juga bagaimana kita mengembangkan dan menjalankan hidup bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip Aswaja. Itu juga perlu dikembangkan fiqihnya. Ini semua merupakan agenda yang luar biasa luas, dan itu harus diambil dengan penuh tanggung jawab oleh para ulama NU ke depan. Jadi, kita jangan hanya berhenti pada etika atau fiqih peribadatan saja.

***Tadi Anda menyebut pentingnya mengembalikan supremasi ulama. Apa maksudnya?***

Ulama harus mengambil peranan yang sangat penting sebagai faktor determinan di dalam membawakan NU ke depan. Tentu saja ini terkait dengan usaha yang terorganisir dan sistematis dan terkonsep tentang kaderisasi ulama ke depan. Selama ini kita tidak berpikir secara sungguh-sungguh tentang bagaimana ulama dikader yang sesuai dengan tantangan zaman dari waktu ke waktu. Bahan baku keilmuan yang diberikan pada kiai-kiai kita sekarang dan beberapa puluh tahun, dan mungkin beberapa ratus tahun yang lalu itu kurang lebih masih sama. Saya kira perlu kita pikirkan kembali, karena problem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berekonomi, berpolitik, dan seterusnya itu juga semakin kompleks dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kemampuan ulama untuk menyikapi problem sosial kemanusiaan yang terus berkembang

berdasarkan prinsip akhlak atau etika dan moral Ahlussunnah Waljamaah juga ikut berkembang. Untuk bisa mengembangkan etika Ahlussunnah Waljama'ah, kita juga harus mampu memahami *setting* kehidupan yang nyata itu sendiri. Kalau kita tidak memahami *setting* kehidupan politik, saya kira kita tidak bisa berbicara tentang etika politik yang sesuai dengan bobot dan tantangan politik itu sendiri. Begitu pula persoalan ekonomi. Sekarang ada globalisasi, misalnya, sesuatu yang harus disikapi dengan serius oleh agama kita, oleh pemikiran-pemikiran keulamaan kita. Karena globalisasi membawa implikasi yang mendasar terhadap pandangan hidup, pandangan dunia kita semua, dan juga akhlak kita semua. Jadi, leadership keulamaan bukan hanya bergerak pada wilayah keilmuan, akan tetapi juga pada visi sosialnya. Di sinilah perlunya kaderisasi ulama yang sungguh-sungguh dan sistematis. Sehingga dalam kepemimpinan NU, di mana posisi ulama ditempatkan sebagai pengarah, penentu, dan pengambil kebijakan strategis itu betul-betul bisa diisi dan dimainkan.

***Bagaimana menurut Anda posisi ulama selama ini?***

Selama ini saya melihat bahwa supremasi ulama belum terimplementasi secara baik. Terus terang, dalam kepemimpinan NU, yang lebih banyak tampil bukanlah Syuriah, tetapi Tanfidziyah. Ulamanya kurang tampil atau kurang ditampilkan. Misalnya, dalam berbagai *event* organisasi, misalnya konferensi

cabang, konferensi wilayah, atau juga acara-acara lainnya, mestinya yang tampil bukan hanya Tanfidziyah, tetapi juga Syuriah. Pembagian tugas ini ke depan harus jelas. Menurut saya, intinya, tugas utama ulama atau Syuriah itu adalah pembinaan umat, tidak hanya membina akhlakunya. Itu yang penting. Sehingga forum-forum ulama atau Syuriah untuk pembinaan umat itu di dalam acara-acara yang bersifat massal, seperti pengajian umum, tabligh akbar, ceramah-ceramah, *muludan*, *rejeban*, itu porsi Syuriah. Semestinya di situlah tugas Syuriah, yaitu untuk membangun etika bangsa dan umatnya, termasuk apa yang disebut etos kerja atau semangat bekerja dan berjuang. Sementara forum Tanfidziyah adalah rapat kerja. Jadi Tanfidziyah jangan memperbanyak ceramah umum. Ceramah umum itu adalah tugas ulamanya, Syuriahnya. Kalau Tanfidziyah itu terkait dengan rapat kerja dengan sesama pengurus yang tujuannya mengimplementasikan kebijakan-kebijakan organisasi menjadi aksi-aksi nyata. Itulah wilayah kerja Tanfidziyah. Jadi, kalau Tanfidziyah berkunjung ke daerah-daerah, ia seharusnya bertemu dengan pengurus, bukan dengan umat. Ini perlu dipertegas agar tidak tumpang tindih. Kalau Tanfidziyahnya yang ketemu dengan umatnya, itu nanti tidak bekerja, hanya banyak omong, hanya ceramah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu akhirnya organisasi menjadi *mandeg*. Bahwa kadang-kadang pengurus Tanfidziyahnya perlu bertemu dengan umatnya, boleh-boleh

saja, tapi itu tidak boleh menjadi agenda utama.

Untuk ini, sekali lagi, perlu ada kriteria yang lebih tajam bagaimana kriteria seorang Syuriah yang akan menjadi pembimbing umat. Begitu juga kriteria yang harus dipenuhi Tanfidziyah, karena mereka akan mengimplementasikan kebijakan Syuriah. Jadi ada dua hal yang berbeda. Dan jangan sekali-kali Tanfidziyah menjadi Syuriah, dan kemudian akhirnya Syuriah berhenti, lalu mereka tersisih dari kegiatan dan panggung organisasi.

***Salah satu klausul inti dari rumusan Khittah adalah mempertegas jarak antara NU dan politik, atau dalam istilah Anda mengambil jarak yang sehat dengan kekuatan politik. Bagaimana Anda menjelaskan prinsip ini?***

Maksudnya, NU harus mengambil jarak yang sehat dengan kekuatan politik yang ada di republik ini, baik kekuatan politik yang berbasis pada partai maupun pada kekuatan politik yang dijalankan oleh pemerintah, atau bahkan kegiatan politik yang bersifat perorangan. Intinya, bahwa NU tidak boleh lagi digunakan sebagai kendaraan oleh para elitnya untuk memperebutkan jabatan politik tertentu. Misalnya, seorang ketua cabang, nanti ikut memperebutkan jabatan bupati, lalu dia gunakan struktur atau organisasi NU di cabangnya untuk mendukung atau memobilisir dukungan pada dirinya. Itu tidak dibenarkan. Persis dengan apa yang terjadi kemarin, seorang



ketua PBNU masuk dalam kompetisi untuk memperebutkan kursi kekuasaan dengan menggunakan organisasi NU sebagai alat mobilisasi. Ini tidak boleh terjadi lagi. Prinsipnya, NU jangan pernah lagi dipakai sebagai alat untuk mobilisasi dukungan politik yang bersifat partisan seperti itu. Karena, saya pikir, NU bukanlah halte penantian kekuasaan, yang ketika ada bis politik lewat, mereka berduyun-berduyun berebut untuk menaiki bis tersebut.

### ***Apakah tidak dibenarkan jika orang pengurus NU menjabat jabatan pemerintahan atau politik?***

Begini, kalau jabatan politik, misalnya menjadi ketua partai, aparat partai, atau tangan partai di parlemen, menurut saya sebaiknya harus tidak. Karena bagaimanapun, pada momen-momen tertentu, kedudukan-kedudukan itu, misalnya kedudukan sebagai pengurus partai, atau sebagai tangan partai yang ada di parlemen diperoleh dari dukungan massa. Ini yang tidak boleh. Tapi, kalau misalnya seorang pengurus NU itu ditunjuk atau diminta oleh pemerintah, misalnya, seorang sekretaris cabang atau wilayah diminta menjadi Sekwilda tanpa memperebutkan, menurut saya masih bisa ditolerir sejauh tidak mengganggu profesionalitas kerja yang bersangkutan. Tapi kalau pengurus NU memperebutkan, itu yang tidak boleh. Kalau memperebutkan, dia harus melepas kepengurusan, atau tidak usah memperebutkan. Ke depan, akan sangat terbuka kemungkinan,

misalnya ketua cabang ikut memperebutkan jabatan bupati, walikota, atau wakilnya. Kalau terjadi, ia harus melepaskan jabatannya di NU, bukan hanya non-aktif, tapi harus mundur. Dengan cara seperti itu, bukan berarti NU membuang dia. Justru seseorang, misalnya ketua cabang, kemudian dia dianggap layak untuk memperebutkan kursi bupati, anggapan bahwa dia layak itu sebenarnya karena berkat posisinya di NU. Jadi, meskipun dia jadi bupati, dan dalam kepengurusan NU tidak lagi menjabat, tetap saja secara moral ia terikat dengan NU. Asumsinya, dia dilirik untuk menjadi calon itu pun karena dia dianggap sebagai pimpinan masyarakat NU.

### ***Bagaimana NU berhubungan dengan pemerintah?***

Dengan pemerintah kita harus menjaga jarak yang sehat. Artinya, kita tidak *apriori* membenci dan menolak, tapi juga tidak *apriori* mendukung. Supaya kita bisa memainkan dan memenuhi peranan kita sebagai kekuatan moral terhadap pemerintahan. Artinya, NU harus melakukan tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar atau kontrol sosial terhadap kekuasaan. Kontrol ini dilakukan sebagai tanggung jawab moral, bukan tanggung jawab politik. Manfaatnya bahwa kalau NU melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah, itu bukan dalam rangka menggoyang pemerintah dan kemudian kita yang menggantikannya. Sama sekali bukan begitu. Jadi berbeda dengan partai. Kalau partai itu melakukan kritik terhadap

kebijakan pemerintah itu dalam rangka mencari kelemahan dan kalau menggoyang pemerintahan yang ada untuk kemudian menjatuhkannya dan dia menggantikannya. Itu yang namanya kontrol politik. Tapi yang harus dimainkan NU adalah kontrol sosial secara moral sebagai kekuatan moral, bukan sebagai kekuatan politik. Jadi kita ingin menegaskan bahwa kalau ada kebijakan yang kita anggap tidak benar, kita harus mengatakan tidak benar dan kita juga harus bertanggung jawab untuk memberikan alternatifnya. Itu semua kita lakukan semata-mata sebagai peringatan moral, bukan untuk menggoyang dan memperebutkan kekuasaannya.

***Apa patokan atau standar menyangkut benar tidaknya kebijakan pemerintah?***

Patokannya adalah *mashalih al-ra'iyah*, kepentingan warga. Jadi, kebijakan pemerintah yang memihak kepada rakyat, terutama yang ada di bawah, bagi NU itu adalah kebijakan yang benar. Dan NU wajib memberikan dukungan. Kalau perlu bukan hanya dukungan politik, akan tetapi kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan ke-bijakan itu. Misalnya, kalau ada kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan nelayan. Kebijakan semacam ini pasti kita dukung. Dan pemerintah saat ini juga perlu melakukan kerja sama dengan NU. Kenapa? Karena sebagian besar nelayan itu adalah warga NU. Tentu itu akan lebih efektif dalam implementasi kebijakan. Atau ada kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan petani, kita

akan dukung. Dan pemerintah dalam hal ini juga harus bekerja sama dengan NU, sebagaimana juga NU siap bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan petani, karena sebagian besar petani adalah warga NU. Sehingga kerja sama ini pasti akan lebih efektif dengan mengumpulkan dua belah pihak: NU bisa berbuat lebih nyata dan pemerintah bisa mengimplementasikan kebijakannya secara lebih mudah. Begitu juga kebijakan-kebijakan yang lain. Itulah patokan hubungan kita dengan pemerintah, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang sehat. Jadi, hubungan kita dengan pemerintah adalah hubungan sebagai kekuatan moral, bukan sebagai kekuatan politik.

***Hal lain yang Anda sebutkan tadi adalah peran NU dalam tugas-tugas pemberdayaan umat. Apa maksudnya?***

Begini, artinya NU akan mengambil fokus kerjanya pada prioritas pemberdayaan masyarakat atau umat, terutama yang ada di lapis bawah. Bagaimana meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup umat kita, kualitas pendidikan warga, kualitas kesehatan warga, itu yang harus menjadi fokus NU ke depan. Untuk ini kita tentu harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa mendukung visi ini, bisa dengan pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat—baik dalam maupun luar negeri. Saya pikir itu tidak masalah. Karena kita tahu bahwa kita tidak akan bisa berkata apapun kalau umat kita sendiri dalam keadaan lemah. Selama ini,



pemberdayaan umat nyaris tidak dipikirkan, sehingga manfaat dan keberadaan NU bagi umatnya nyaris tidak terasa, kecuali pada musim-musim politik saja, lima tahun sekali. Jadi, para elit menjenguk warga hanya pada momen-momen politik untuk mendapat dukungan warganya. Sementara ketika umat memerlukan dukungan, mereka tidak pernah mendekat. Inilah sebenarnya akibat yang paling fatal dari kepemimpinan NU selama ini. Umat tidak pernah dijenguk kecuali pada saat para elit membutuhkan dukungan mereka. Jadi ini merupakan skandal kepemimpinan. Itu tidak boleh terulang lagi. Kita tahu bahwa Indonesia ini sebagian besar penduduknya adalah umat Islam, dan sebagian besar umat Islam adalah warga NU. Kalau Indonesia mau bergerak maju, warga NU harus ikut bergerak maju. Pembangunan juga harus menyentuh pada arah dan usaha keras untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka, dan NU harus mendukung kebijakan yang secara jelas berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan warga NU.

***Anda juga menyebutkan bahwa NU harus berpartisipasi dalam memajukan dan menjaga keutuhan bangsa. Seberapa besar tanggung jawab NU dalam hal ini?***

Sebagai bagian terbesar dari bangsa ini, NU harus memikul tanggung jawab yang lebih besar terhadap keutuhan dan kemajuan bangsa ini. Kalau dalam hal keutuhan bangsa, saya pikir, sumbangan NU sangat berarti. Misalnya sumbangan

NU tentang keutuhan bangsa ini dilakukan sejak awal ketika pada masa-masa revolusi, Mbah Hasyim dan seluruh ulama NU mengeluarkan Resolusi Jihad. Itu tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan republik ini yang sedang terancam oleh invasi Belanda. Kemudian kita tahu bahwa perang heroik 10 November 1945 juga diilhami dari keputusan Resolusi Jihad yang diterbitkan bulan Oktober di Tebuireng. Sumbangan NU yang kedua dalam keutuhan negara republik Indonesia ini, misalnya, pada tahun 1953 pada keputusan Munas Alim Ulama NU di Cipanas yang menetapkan Soekarno sebagai *Waliy al-Amri al-Dharuri bi al-Syaukah*. Keputusan ini menjadi penting dalam rangka menegakkan dan menjaga keutuhan NKRI. Sebagaimana kita tahu, pada saat itu NKRI digoncang oleh kekuatan DI/TII di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo dan kelompoknya menuntut dua hal, *pertama*, supaya NKRI dijadikan sebagai Negara Islam Indonesia. *Kedua*, menuntut agar kepemimpinan Soekarno itu dianggap tidak sah. Dua tuntutan ini satu sama lain terkait erat. Dan NU dengan tegas menolak dua tuntutan itu. Sikap ini sungguh luar biasa, karena orang mengira bahwa NU sebagai organisasi keula maansementasnya akan mendukung ide NII, bukannya NKRI. Tapi ternyata semangat nasionalisme para kiai masih begitu membara. Beliau-beliau ini menolak mengukuhkan NII, tapi tetap mempertahankan NKRI, meskipun dalam NKRI kita harus bersedia hidup bersama-

sama dengan orang-orang yang beragama lain. Di sinilah sumbangsih ulama NU yang luar biasa terhadap keutuhan NKRI. Selain itu, para ulama menolak supaya Soekarno dianggap tidak sah kepemimpinanannya. Argumentasi mereka, Soekarno menjadi presiden tidak melalui proses pemilu, tetapi atas dasar keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun ulama tetap menganggap bahwa Soekarno adalah Presiden RI. Penolakan NU didasarkan karena *pertama*, secara politik, kalau Soekarno dianggap tidak sah, di samping dapat memecah keutuhan bangsa ini—lebih-lebih tahu usulan untuk menganulir keputusan kepresidenan Soekarno datang dari NII/TII dan itu pasti dilatari oleh ide pendirian Negara Islam Indonesia—setidaknya apa yang disebut Indonesia bagian Timur akan memisahkan diri. Jika demikian, itu akan mengancam keutuhan bangsa, dan NU tidak menghendaki perpecahan itu. *Kedua*, ada logika fiqih. Para kiai menganggap bahwa kalau Soekarno tidak dianggap sah kepresidenannya, maka seluruh keputusannya sebagai presiden juga tidak sah, termasuk keputusan mengangkat menteri agama. Kalau pengangkatan menteri agama itu tidak sah, maka seluruh keputusan menteri agama juga tidak sah, termasuk keputusan menteri agama untuk mengangkat penghulu. Kalau pengangkatan penghulu itu tidak sah, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak sebagai penghulu juga tidak sah, termasuk langkah para penghulu untuk mengawinkan warga

Indonesia. Kalau nikahnya yang dilakukannya oleh para penghulu itu tidak sah, berarti perkawinannya juga tidak sah. Jadi hubungan suami istri selama itu dianggap sebagai hubungan zina. Jadi atas dua logika politik dan logika fiqih, maka alim ulama NU menetapkan bahwa Soekarno adalah *waliy al-amri*. Tapi karena tidak diangkat melalui proses dan prosedur yang normal, maka disebut dengan *waliy al-amri al-dharuri bi al-syaukah*. Itu sumbangan NU terhadap keutuhan NKRI.

Begitu juga terhadap keutuhan NKRI. Bahkan hingga saat ini, ketika gerakan separatisme kembali mulai muncul, misalnya terjadi di Aceh dan Papua, para kiai NU mengadakan Bahtusl Masa'il tentang gerakan separatisme. Dari persepektif konsep *bughat* dalam fiqih, para ulama menyimpulkan bahwa separatisme itu memang tidak dibenarkan. Itulah yang disebut dengan *al-khuruj 'an al-imam* ("membangkang terhadap penguasa"—red.). Bahkan dalam fiqih, gerakan separatisme bisa dihadapi dengan kekuatan senjata, meskipun ada syaratnya, yaitu *pertama* bahwa gerakan separatisme itu diajak berunding, namun ia tidak mau. *Kedua*, gerakan separatisme itu menggunakan senjata. Jadi kalau mereka diajak berunding tidak mau, mereka juga menggunakan kekuatan senjata dan mereka menyatakan penolakan terhadap pemerintahan, maka gerakan separatisme itu bisa dihadapi dengan kekuatan bersenjata, tetapi tetap menjunjung tinggi etika perang bahwa tidak boleh merusak properti maupun menyakiti warga negara,



khususnya yang sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Itulah prinsip-prinsip yang diatur NU dalam mempertahankan NKRI. Yang penting ke depan, keutuhan bisa dipertahankan terus meskipun pasti ada kemungkinan gangguan-gangguan, kerusuhan-kerusuhan di mana-mana. NU, saya kira, akan terus memainkan peranannya menjadi perekat bangsa. Yang penting ke depan, kita harus maju. Jadi tidak cukup dengan utuh saja, tetapi juga memajukan. Di sinilah peranan NU dalam menggerakkan roda pembangunan bangsa, dan ini harus menjadi tanggung jawab yang disadari betul oleh NU.

***Anda telah menjelaskan lima prinsip yang tertuang dalam Khittah. Bagaimana menerjemahkan lima prinsip tadi dalam wujud program-program konkret di NU?***

Untuk mewujudkan lima prinsip tadi harus tertuang dan didukung oleh tiga hal. *Pertama*, oleh program yang konsisten dengan lima prinsip tadi. *Kedua*, didukung oleh struktur organisasi yang memadai, dan *ketiga* harus didukung dengan perangkat organisasi yang juga kapabel, mampu menerjemahkan visi NU dan menerjemahkannya dalam langkah-langkah program dengan lima prinsip Khittah tadi. Di samping itu orang-orang yang duduk di struktur organisasi atau kepemimpinannya harus peka terhadap persoalan warganya dan bangsanya.

***Apa harapan Anda pada NU ke depan, khususnya menjelang Mukhtamar ke-31 di Solo nanti?***

Saya pikir, semuanya harus mempersiapkan diri secara mendalam, bukan hanya menyangkut persoalan orangnya. Meskipun kita tahu bahwa membicarakan persoalan orang selalu lebih menarik. Tapi hendaknya kita harus menyisakan energi kita secara sungguh-sungguh untuk memikirkan dua hal, program dan struktur kelengkapan organisasi. Mungkin memang agak krusial membincang tentang orang, karena ada dampak politisasi NU kemarin pada saat pilpres. Saya kira akan ada pengaruh yang kuat terhadap Mukhtamar nanti. Karena saya dengar bahwa Pak Hasyim juga mau naik, dan pihak lain seperti Gus Dur juga mau maju. Saya kira itu tidak menjadi masalah. Tapi yang penting, menurut saya, harus segaris dengan prinsip-prinsip NU. Maksud saya, ini tidak menjadi masalah jika NU mengutamakan, *pertama*, keutuhan organisasi dan *kedua* kalau sudah utuh kita menjamin Mukhtamar nanti NU benar-benar mengambil lima agenda tadi sebagai acuan dalam program-program organisasi. Ini artinya bahwa NU harus dilihat kembali sebagai organisasi keulamaan yang muaranya pada pemberdayaan dan pelayanan pada umat. Jadi jangan lagi menjadi organisasi yang justru umat disuruh melayani para elitnya. ■